

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata, W.S. 1999. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM.1991. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Provinsi Lampung*. Berbagai Edisi. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Lampung.
- Badrudin, Rudi. 2012. *Ekonomi Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Bank Indonesia. 2010. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Lampung*.
- Bappenas. 2003. *Peta kemampuan keuangan propinsi dalam era otonomi daerah : tinjauan atas kinerja PAD dan upaya yang dilakukan daerah*. Direktorat pengembangan otonomi daerah.
- Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. *GaneC Swara Edisi Khusus* Vol. 4 no. 3 Desember 2010.
- Deddyk. 2008. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah UUP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Pubik Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Harun, Amrullah dan Pan Budi. 2006. *Indikator MakroSosial-Ekonomi sebagai Pengukuran Kinerja Daerah: Kasus Kabupaten Bangka*.

- Hidayat, Paidi dan Wahyu Ario Pratomo. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No. 3, Desember 2007 Hal: 212 – 222.
- Kaho, JosefRiwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia:Identifikasi BeberapaFaktoryangMempengaruhi penyelenggaraannya*. Jakarta: PTRajaGrafindoPersada.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004.*Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Ladjin, N. 2008.*Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tengah*. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Losa, Al Fino. 2012. *Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi sumatera barat*. Sumatera Barat.
- Mariani, Lidia. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat)*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Mills, A. 1994. *Decentralization andAccountability in The Health SectorFrom an International Perspective:What Are The Choices?*. PublicAdministration and Development, Vol.14.
- Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)*.Diponegoro Journal of Accounting.
- Oktarida, Anggerini. 2012. *Desentralisasi fiskal di indonesia*. Jurnal ilmiah volume IV no. 2, 2012. Politeknik negeri sriwijaya.
- Mardiasmo, 2002.*Akuntansi Sektor Publik*, Edisi II, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Reksohadiprojo, Ph.D, M.Com, M.A., Sukanto. 2001. *Ekonomika Publik*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE – UGM.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia.2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

- Republik Indonesia. 2003. *Peraturan pemerintah no. 84 tahun 2001 tentang dana perimbangan republik indonesia.*
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan menteri dalam negeri no. 13 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah.*
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*
- Rusdianto S., S.H., M.H. 2010. *Desentralisasi Fiskal Dalam Sebuah Negara Kesatuan (Unitary State).* Universitas Narotama Surabaya.
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sarundajang, S.H. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muluk, M.R. Khairul. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah.* Malang: Bayumedia Publishing.
- Sasana, Hadi. 2009. *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.* *Jurnal Ekonomi Pembangunan.*
- Siddik, Machfud. 2002b. *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional.* Makalah pada Seminar Nasional "Public Sector Scorecard." Jakarta, 17-18 April 2002.
- Susantih, Heny dan Yulia Saftiana. 2009. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Se-Sumatera Bagian Selatan.* Tesis. Universitas Sriwijaya

- Syaukani.2005. Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Implementasi Otonomi Daerah, dalam Haris, Syamsuddin (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga – Edisi Kedelapan – Jilid 2*. Alih bahasa Haris Munandar. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Utomo, Sugeng Hadi dan Hadi Sumarsono. 2009. *Dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap efisiensi sektor publik dan pertumbuhan ekonomi di Jawa timur*. Jurnal vol. 1, no 2, 2009. Universitas negeri malang.
- Wahyuni, nanik. 2007. *Analisis rasio untuk mengukur kinerja pengelolaan daerah kota malang*. Jurnal FE UIN MALIKI Malang.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.